



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BOB INDIARTO AGUS SUSATYO**
2. Jabatan : **DIREKTUR PRODUKSI**
3. NHK : **101142**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 24.432.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 269 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 4.690.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/338 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/600 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.532.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
5. Bangunan Seluas 63 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
6. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 9.375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 478.750.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.750.000
2. MOBIL, DAIHATSU SIRION Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000



4. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.284.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.867.664.912

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 34.062.914.912

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 34.062.914.912

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.